

RENCANA KERJA PERUBAHAN

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDRAP
KECAMATAN WATANG SIDENRENG
TAHUN 2024**



RENJA PERUBAHAN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan ini masih belum sempurna sehingga kritik, saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan dalam penyusunan RENJA ditahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RENJA ini.



Watang Sidenreng, 06 Agustus 2024
Camat Watang Sidenreng

H.ARNOL BARAMULLI, ST.M.Adm.KP

Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19730208 200802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 9

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II..... 12

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Watang Sidenreng 18

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 20

3.1 Rencana Kerja 20

3.2 Indikator Program dan kegiatan..... 29

BAB V PENUTUP 33

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku

selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan untuk menyesuaikan antara perencanaan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi terkini. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Perubahan Renja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng. Sejalan dengan itu, muatan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun

anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 ;
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2024 dan Renstra Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Watang Sidenreng adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2024 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Watang Sidenreng untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. **PENDAHULUAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II. **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Renja perangkat daerah sampai dengan triwulan ii tahun 2024, dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

BAB III. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** terdiri atas beberapa bagian yaitu Program dan Kegiatan, dan Indikator Program dan Kegiatan.

BAB IV. **PENUTUP**

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

2.2 Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Rencana Kerja merupakan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian berikut :

2.2.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri atas kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan mencapai tingkat realisasi 0%.

2.2.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri atas kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dan kegiatan pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan evaluasi Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi 0%.

2.2.3 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Desa yang mencakup kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa terdiri atas sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan fasilitasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum telah mencapai tingkat realisasi 0%.

2.2.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub kegiatan pengadaan mebel dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan

peralatan dan mesin lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya telah mencapai tingkat realisasi target 20 %.

Selanjutnya evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



TABEL II.1.a (RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

OPD : KECAMATAN WATANG SIDENRENG

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s/d TAHUN 2021- 2023	REALISAS I TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARA N KEGIATAN TAHUN 2021-2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGK AT DAERAH	REALISASI RENJA PERANGK AT DAERAH	TINGKAT REALISA SI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=9/4*100
7	Unsur Kewilayahan								
7 1	Kecamatan								

7 1 2 .	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%						
7 1 1 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100				100	6%
7 1 1 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1094	Org/Bln	350				350	11%
7 1 1 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100				100	14%
7 1 1 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	13	Paket	5				5	2%
7 1 1 206 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	144	Paket	65				65	33%

7 1 1 206 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	40 Laporan	20				20	6%
7 1 1 206 09	Penyelaenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	423 Laporan	141				141	27%
7 1 1 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	100				100	29%
7 1 1 207 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	58 Unit/Buah	4				4	7%
7 1 1 207 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit/Buah	5				5	63%
7 1 1 207 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit/Buah	3				3	43%
7 1 1 207 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	77 Unit/Buah	4				4	5%

	Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya							
7 1 1 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100				100	35%
7 1 1 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	243 Laporan	219				219	19%
7 1 1 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	72 Laporan	48				48	67%
7 1 1 208 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Laporan	15				15	0%
7 1 1 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72 Laporan	48				48	56%

7 1 1 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100				100	25%
7 1 1 209 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	29 Unit	8				8	28%
7 1 1 209 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	2				2	8%
7 1 1 209 03	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	13 Unit	2				2	15%
7 1 1 209 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	17 Unit	5				5	29%
7 1 1 209 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	11 Unit	5				5	45%

7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	0				100	
7 1 2 204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	0				100	57%
7 1 2 204 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan	9 Laporan	2				2	22%
7 1 2 204 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	13 Laporan	12				12	92%
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	100				100	
7 1 3 201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	0				33	56%

7 1 3 201 02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3				3	100%
7 1 3 201 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	1				1	13%
7 1 3 202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	100				100	33%
7 1 3 202 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Paket	6				6	50%
7 1 3 202 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 Pokmas	15				15	50%
7 1 3 202 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6 Kelurahan	0				-	0%

7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	0				100	
7 1 6 201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	0				100	25%
7 1 6 201 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	5				5	50%
7 1 6 201 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	10 Dokumen	0				-	0%

TABEL II.1.b (RENSTRA RPD 2024-2026)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

OPD : KECAMATAN WATANG SIDENRENG

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s/d TAHUN 2024- 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARA N KEGIATAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=9/4*100
7	Unsur Kewilayahan								

7 1 .	Kecamatan								
7 1 2 . .	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %					100	100
7 1 1 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %					100	100
7 1 1 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	135 6 Org/Bln		350	150	42,9%	150	1106%
7 1 1 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %					100	100
7 1 1 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	105 Paket		4	2	50,0%	2	2%
7 1 1 206 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	24 Paket		15	8	53,3%	8	33%

7 1 1 206 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96 Laporan	12	6	50,0%	6	6%
7 1 1 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	565 Laporan	266	150	56,4%	150	27%
7 1 1 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %				100	100
7 1 1 207 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit/Buah	4	4	100,0%	4	100%
7 1 1 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %				100	100
7 1 1 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	514 Laporan	220	100	45,5%	100	19%
7 1 1 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	36 Laporan	48	24	50,0%	24	67%

7 1 1 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36	Laporan	48	20	41,7%	20	56%
7 1 1 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%				100	100
7 1 1 209 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	27	Unit	13	6	46,2%	6	22%
7 1 1 209 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9	Unit	18	12	66,7%	12	133%
7 1 1 209 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	15	Unit	5	3	60,0%	3	20%
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%				100	100

7 1 2 204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %					100	100
7 1 2 204 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan	36 Laporan		12	6	50,0%	6	17%
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %					100	100
7 1 3 201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %					33	33
7 1 3 201 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36 Laporan		8	4	50,0%	4	11%
7 1 3 202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %					100	100

7 1 3 202 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45	Laporan	8	8	100,0%	8	18%
7 1 3 202 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54	Pokmas	36	16	44,4%	16	30%
7 1 3 202 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	9	Kelurahan	3	1	33,3%	1	11%
7 1 5 . . .	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%					
7 1 5 201 . . .	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%					
7 1 5 201. 8 . . .	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	12	6	50,0%	6	50%

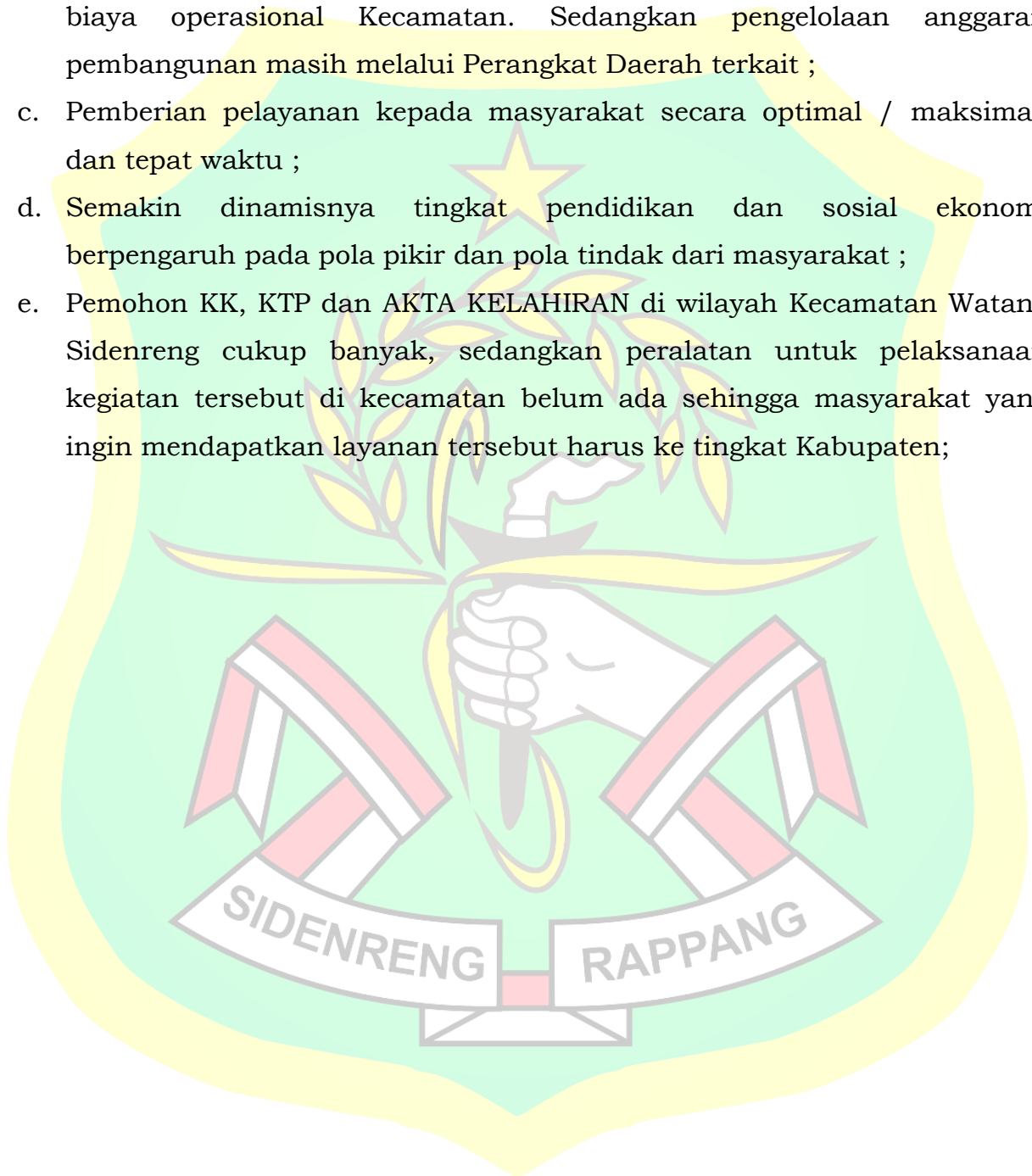
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %					100	100
7 1 6 201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %					100	100
7 1 6 201 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen		5	2	40%	2	13%
7 1 6 201 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15 Dokumen		5	2	40%	2	13%

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Watang Sidenreng

Isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Watang Sidenreng sebagai berikut :

1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan PD Kecamatan Kecamatan Watang Sidenreng telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Watang Sidenreng
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Watang Sidenreng antara lain :
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
 - b. Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Sidenreng Rappang. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Watang Sidenreng sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;
 - c. Melemahnya ketahanan sosial ekonomi akibat pandemi covid 19 sehingga pemerintah memprioritaskan pemulihan sosial ekonomi akibat covid 19 dan tranformasi ekonomi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Melambatnya roda perekonomian diakibatkan oleh merebaknya wabah covid 19
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Kecamatan Watang Sidenreng beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng diantaranya :

- a. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran
- b. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait ;
- c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal / maksimal, dan tepat waktu ;
- d. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat ;
- e. Pemohon KK, KTP dan AKTA KELAHIRAN di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng cukup banyak, sedangkan peralatan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut di kecamatan belum ada sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan layanan tersebut harus ke tingkat Kabupaten;



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dimana pada tahun 2024 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), peningkatan kualitas layanan urusan pemerintahan umum dengan indikator kinerja yaitu persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, peningkatan kualitas layanan urusan koordinasi dengan indikator kinerja yaitu persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan dengan nilai 100% dan peningkatan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan dengan indikator kinerja yaitu persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan nilai 100%.

Perencanaan program tahun 2024 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

KANTOR KECAMATAN WATANG SIDENRENG

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHA DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	Kelompok Penerima Mamfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHA DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	Kelompok Penerima Mamfaat
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
		Predikat Nilai Sakip (%)		60,20	Persen	2.622.317.000	DAU		60	Persen	2.667.370.000	DAU
7.01.01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah		100	Persen	2.622.317.000			100	Persen	2.667.370.000	

	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Daerah Kabupaten/Kota										
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)		0					0	0	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraa n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		100	Persen	2.107.760.500			100	Persen	2.107.760.500	
7.01.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Kec.W atsid	448	Bulan	2.107.760.500	ASN Ktr.Kec.Wat sid	Kec.W atsid	350	Bulan	2.107.760.500	ASN Ktr.Kec.Wats id
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi		100	Persen	115.760.000	ASN Ktr.Kec.Wat		100	Persen	115.760.000	ASN Ktr.Kec.Wats

		Umum Pernagkat Daearah (%)					sid					id
7.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan (Paket)	Kec/Kel	5	Paket	11.352.000	ASN Ktr.Kec.Watsid	Kec.Watsid	4	Paket	11.352.000	ASN Ktr.Kec.Watsid
7.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah yang Disediakan (Paket)	Kec/Kel	7	Paket	12.372.000	ASN Ktr.Kec.Watsid	Kec.Watsid	15	Paket	12.372.000	ASN Ktr.Kec.Watsid
7.01.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Kec.Watsid	32	Laporan	18.836.000	ASN Ktr.Kec.Watsid	Kec.Watsid	12	Laporan	18.836.000	ASN Ktr.Kec.Watsid

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kec/Kel	187	Laporan	73.200.000	ASN Ktr.Kec.Watsid	Kec.Watsid	266	Laporan	73.200.000	ASN Ktr.Kec.Watsid
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		100	Persen	42.000.000			100	Persen	71.878.000	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec/Kel	8	Unit	-			0	Unit	-	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4	Unit	42.000.000			4	Unit	71.878.000	

7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5	Unit	-			0	Unit	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100	Persen	289.631.500			100	Persen	304.806.500	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Kec/Kel	170	Laporan	3.080.000	ASN Ktr.Kec.Wat sid	Kec.Wat sid	220	Laporan	3.080.000	ASN Ktr.Kec.Wat sid
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kec/Kel	12	Laporan	36.600.000	ASN Ktr.Kec.Wat sid	Kec.Wat sid	48	Laporan	51.775.000	ASN Ktr.Kec.Wat sid

		Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)										
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec/Kel	8	Laporan	-	ASN Ktr.Kec.Wat sid	Kec.W atsid	0	Laporan	-	ASN Ktr.Kec.Wats id
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kec/Kel	12	Laporan	249.951.500	ASN Ktr.Kec.Wat sid	Kec.W atsid	48	Laporan	249.951.500	ASN Ktr.Kec.Wats id
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100	Persen	67.165.000			100	Persen	67.165.000	

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)										
7.01.01.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Kec/Kel	9	Unit	36.529.000	ASN Ktr.Kec.Watsid	Kec.Watsid	13	Unit	36.529.000	ASN Ktr.Kec.Watsid
7.01.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kec/Kel	3	Unit	10.050.000			18	Unit	10.050.000	
7.01.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Kec/Kel	5	Unit	20.586.000			5	Unit	20.586.000	

		Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)										
		Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik (%)		100	Persen	50.800.000			100	Persen	80.800.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)		100	Persen	800.000			100	Persen	800.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (%)		100	Persen	800.000			100	Persen	800.000	

7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	Kec.Watsid	8	Laporan	800.000	ASN Ktr.Kec.Watsid	Kec.Watsid	12	Laporan	800.000	ASN Ktr.Kec.Watsid
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum (%)		100	Persen	50.000.000	ASN Ktr.Kec.Watsid	Kec.Watsid	100	Persen	80.000.000	ASN Ktr.Kec.Watsid
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (%)		100	Persen	50.000.000			100	Persen	80.000.000	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Kec.Watsid	4	Dokumen	50.000.000			12	Dokumen	80.000.000	

		Kecamatan (Dokumen)										
		Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik (%)		100	Persen	479.796.000			100	Persen	479.796.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)		100	Persen	479.796.000			100	Persen	479.796.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)		100	Persen	500.000			100	Persen	500.000	

7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	KEC	8	Laporan	500.000			8	Laporan	500.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)		100	Persen	479.296.000			100	Persen	479.296.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	KEC	4	lembaga	4.800.000			8	lembaga	4.800.000	

	Kelurahan	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)										
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3	Unit	-		0	Unit	-		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	KEL	18	Pokmas	473.896.000		36	Pokmas	473.896.000		
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	KEC	3	Laporan	600.000		3	Laporan	600.000		

		(Laporan)										
		Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik (%)		100	Persen	1.200.000			100	Persen	1.200.000	
7.01.06	ROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)		100	Persen	1.200.000			100	Persen	1.200.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)		100	Persen	1.200.000			100	Persen	1.200.000	

7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	KEC	8	Dokumen	600.000			5	Dokumen	600.000	
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	KEC	8	Dokumen	600.000			5	Dokumen	600.000	
			JUMLAH		3.154.113.000				3.229.166.000			

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2024, dengan memperhatikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan watang sidenreng sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik- baiknya;
2. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Watang Sidenreng;
3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng merupakan dasar evaluasi dan laporan

pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan watang sidenreng;

4. Kantor Kecamatan Watang Sidenreng berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Watang Widenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.

Watang Sidenreng, 06 Agustus 2024
CAMAT WATANG SIDENRENG



H.ARNOL BARAMULI, ST.M.Adm.KP

Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19730208 200802 1 001